



Meningkatkan layanan publik, perlukah?

Oleh Aris Wahyudi
 MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Baru-baru ini di beberapa media massa mengemukakan bahwa Jogja adalah kota terbersih dari praktik korupsi dibanding dengan daerah lain. Menggembirakan sekali kabar tersebut ditelenga kita. Sebagai warga Kota Jogja kita tentu bangga dan patut bersyukur mendengar kabar baik tersebut.

Penentuan Jogja sebagai kota terbersih korupsi tidak lain adalah dari survei yang dilakukan oleh TII (Transparency Internasional Indonesia), yang mana lembaga tersebut adalah lembaga audit independen yang cukup kredibel dalam melakukan survei penelitian. Kerja mereka tentu saja untuk mengaudit dan mengawasi kinerja lembaga pemerintahan.

Transparency Internasional Indonesia melakukan survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 50 kota di Indonesia. Hasilnya Jogja menempati urutan peringkat pertama yang bersih dari korupsi dengan skor IPK 6,43 dan urutan peringkat ke 50 ditempati daerah Kupang dengan skor IPK 2,97.

Dari tahun ke tahun tentu hasil survei itu akan jadi berbeda, karena kinerja Pemkot Jogja yang tahun ini mendapat predikat terbaik dan terbersih dari korupsi tidak ditingkatkan semaksimal mungkin. Dan pasti akan jatuh ke daerah lain.

Memang tidak ada daerah yang seratus persen bersih dari praktik korupsi. Namun bisa diminimalisir praktik



tersebut mengingat kita sudah menyangkal gelar tersebut. Tidak mudah untuk mempertahankan predikat sebagai kota terbersih dari korupsi, akan tetapi hal ini bisa ditingkatkan apa yang belum kita benahi mari kita benahi, apa yang kurang memuaskan oleh masyarakat dari pelayanan publik kita sebaiknya dilakukan evaluasi dan juga perbaikan kinerja secara terus menerus.

Dari pemberitaan berbagai media massa menyebutkan bahwa hasil dari Indeks Persepsi Korupsi ditentukan berdasarkan pada pelayanan publik di sejumlah pemerintahan daerah baik itu kepada masyarakat maupun pelaku bisnis. IPK itu dinilai mulai dari perizinan usaha, perpajakan dan pungutan liar. Masyarakat menilai bagus tidaknya suatu pemerintahan terletak pada bagaimana pelayanan itu sendiri. Kalau bagus tentu menghasilkan kepuasan pada masyarakat dan secara otomatis masyarakat akan mengapresiasi kinerja pelayanan publik tersebut.

Penulis menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab kenapa Jogja menyangkal gelar kota terbersih dari korupsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Di antaranya *pertama*, letak lokasi pelayanan publik cukup strategis (Balaikota misalnya). *Kedua*, penggunaan sistem komputerisasi yang modern dan canggih sehingga kecepatan dan kemudahan layanan yang diberikan dapat maksimal. *Ketiga*, komunikasi kinerja pegawai pemerintahan secara vertikal maupun horizontal terjalin cukup kondusif. Komunikasi secara vertikal

berarti antara pimpinan dan bawahan selalu ada komunikasi secara apik dan pimpinan selalu memberikan motivasi para pegawainya sehingga mereka merasa senang dan bersemangat dalam melayani masyarakat. Sedangkan komunikasi secara horizontal bisa efektif bila para pegawai merasa satu tim dengan pegawai yang lain sehingga bisa menciptakan rasa kerjasama dan gotong royong dalam melayani masyarakat.

Hal *keempat* adalah evaluasi kinerja yang dilakukan secara kontinyu. Evaluasi ini bisa dilakukan minimal satu bulan sekali ketika mengadakan rapat. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan selama ini di mata publik, apa yang perlu ditingkatkan, apa masalah yang dihadapi dan bagaimana solusi yang terbaik untuk dilakukan. Tanpa adanya evaluasi ini predikat Jogja sebagai kota terbersih dari praktik korupsi, tentu akan melayang begitu saja ke daerah lain. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat sangat perlu dan bahkan inilah yang biasanya yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu daerah. Semoga Predikat Kota Terbersih dari korupsi terus di tangan Kota Jogja tercinta...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005